

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konsep keamanan yang ada selama ini telah berkembang sejak pasca perang dingin dan berlanjut pada era globalisasi. Konsep ini telah diperluas tidak hanya terfokus pada hal-hal yang bersifat militeristik, tetapi telah berkembang mengarah pada berbagai aspek seperti perlindungan lingkungan, Hak Asasi Manusia, perluasan dagang dan investasi, hingga pemberantasan kejahatan transnasional (Ho, 2009).

Keamanan maritim telah mengalami perluasan konsep pertahanan laut, yang semula ancaman militer hanya dari negara lain tetapi kini termasuk pertahanan terhadap ancaman non militer antara lain perlindungan terhadap kelestarian alam, jalur perdagangan, pemberantasan aksi ilegal di laut dan lain-lain. Sebagai konsekuensinya, keamanan dalam dunia maritim secara umum menjadi tanggung jawab dari semua negara untuk menjaganya dari segala bentuk ancaman (Bateman, 2010).

Maritim merupakan wilayah yang penting bagi negara-negara di dunia. Hal tersebut dikarenakan laut memberikan kebutuhan yang diperlukan bagi semua makhluk hidup. Selain sebagai tempat ketersediaan bahan makanan, laut mempunyai fungsi yang penting bagi manusia yaitu sebagai jalur transportasi yang digunakan sebagai perdagangan domestik maupun internasional. Sejak tahun

1970 perdagangan global melalui transportasi laut telah diperluas dan menangani lebih dari 80 persen dari volume perdagangan global (United Nations, 2012)

Keamanan maritim¹ merupakan salah satu hal penting yang menjadi perhatian negara. Pada era globalisasi saat ini marak kejahatan yang terjadi di laut. Kejahatan tersebut misalnya seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata api, barang ilegal dan perompakan. Kejahatan yang terjadi di laut dan menimbulkan dampak di lebih dari satu negara maka dapat dikategorikan dalam kejahatan transnasional.

Jika keamanan maritim dunia terancam kejahatan, maka untuk menjamin keamanan, kedaulatan nasional, menjamin lingkungan yang damai dan stabil seluruh kawasan, setiap negara perlu mengambil cara pendekatan yang komprehensif dan terpadu tentang keamanan maritim baik tingkat nasional maupun kerja sama regional. Hal tersebut ditujukan agar maritim aman dari ancaman dan ketidakstabilan dari ancaman kejahatan di bidang maritim.

Salah satu kejahatan maritim yang menjadi ancaman global adalah *armed robbery*. Kejahatan tersebut telah menjadi ancaman bagi individu yang bekerja di laut dan perdagangan internasional. Aksi *armed robbery* dianggap sebagai ancaman global karena lebih dari 80% perdagangan global dilakukan melalui jalur

¹Keamanan maritim dikaitkan dengan penanganan terhadap tiga isu ancaman yaitu:

1. Tindakan teroris terhadap pelayaran kapal dan instalasi lepas pantai (*terrorist acts against shipping and offshore installations*)
2. Pembajakan dan perampokan bersenjata (*piracy and armed robbery against ships*)
3. Lalu lintas obat terlarang dan narkotik yang ilegal dan zat-zat psikotropik (*illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances*)

laut. Serangan *armed robbery* menimbulkan gangguan terhadap pasar pelayaran global. Hal tersebut dikarenakan pelaut harus menghindari perompak dan mengubah jalur pelayaran menjadi lebih jauh. Perubahan jalur pelayaran tersebut menghabiskan biaya tujuh kali lipat yaitu 2 sampai 3 miliar dollar AS setiap tahunnya (Farnesina, 2012).

Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran yang rentan dengan ancaman *armed robbery*. Dampak *armed robbery* bagi perdagangan internasional adalah kapal-kapal yang melintasi wilayah tersebut mengalami peningkatan biaya pelayaran yang tinggi. Biaya tersebut meliputi kenaikan premi asuransi, peralatan keamanan kapal, mempekerjakan petugas keamanan swasta dan uang tebusan bagi kapal yang telah dibajak (ITF, 2013). Selain kenaikan biaya, dampak berikutnya adalah meluasnya pasar ilegal. Dalam hal ini perompak melakukan tindakan mencuri barang dagangan yang berharga seperti barang elektronik dan menjualnya dengan harga lebih murah di pasar ilegal (Bensassi, 2010).

Pada November 2010, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ban Ki Moon menyatakan bahwa *armed robbery* memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian dunia. Rute perdagangan internasional terancam sehingga harga barang-barang menjadi tidak stabil (Anna Bowden, 2010).

Serangan *armed robbery* yang terjadi di Somalia merupakan fenomena yang mengganggu jalur perdagangan internasional. Somalia merupakan jalur yang memainkan aktivitas perdagangan global sebesar 80%. Lebih dari 20.000 kapal mengangkut pakaian, minyak mentah dan komoditas lainnya (Johnson, 2014). Di

Somalia, dampak dari *armed robbery* adalah harga barang meningkat, pendapatan masyarakat menurun dan tertundanya kegiatan perdagangan internasional. Hal tersebut dikarenakan wilayah Somalia merupakan daerah berbahaya untuk pelayaran internasional. Lebih dari 3,3 juta barel minyak setiap harinya melewati Teluk Aden. Akibat dari *armed robbery* di Somalia telah mempengaruhi negara-negara di sekitarnya. Adanya serangan dari perompak di Somalia telah mempengaruhi industri perminyakan di negara sekitar Terusan Suez yaitu Bahrain, Iran, Kuwait, Qatar dan Yaman (Elmaghawry, 2009).

Adanya insiden *armed robbery* di beberapa wilayah di dunia menjadi kekhawatiran bagi seluruh negara dan banyak kalangan. Hal tersebut dikarenakan dampak *armed robbery* terjadi terhadap masyarakat luas dan salah satunya adalah gangguan ekonomi global. Akan tetapi insiden *armed robbery* yang terjadi perairan Vietnam berbeda dengan insiden di wilayah lain. Di wilayah lain *armed robbery* telah menimbulkan dampak terhadap ekonomi, namun *armed robbery* yang terjadi di Vietnam tidak menjadi salah satu faktor dominan yang menghambat pertumbuhan ekonomi Vietnam. Dalam memacu pertumbuhan ekonominya, Vietnam melakukan hubungan perdagangan internasional yang salah satunya adalah Tiongkok. Adanya ketergantungan ekonomi kedua negara dalam pemenuhan kebutuhan nasional menjadikan mereka untuk bekerja sama secara ekstensif.

Vietnam merupakan salah satu negara yang mempunyai tiga sisi berbatasan dengan laut yaitu di sebelah Timur, Selatan dan Barat Daya. Laut vietnam memiliki garis pantai sepanjang 3260 km, perairan pedalaman, laut

teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Vietnam mempunyai sekitar 3000 pulau kecil dan kepulauan besar, diantaranya ada dua kepulauan Hoang Sa (Paracels) dan Truong Sa (Spratly). Oleh karena itu, keamanan maritim memainkan peranan penting bagi Vietnam tentang sosial-ekonomi, pertahanan, keamanan dan lingkungan hidup. Dalam menjamin keamanan maritim, Vietnam mempunyai pasukan polisi laut dan patroli perikanan. Keduanya merupakan pasukan pelaksana hukum permanen yang berfungsi menjamin hak dan kepentingan yang sah dari laut Vietnam (VOV, 2012).

Jalur laut Vietnam merupakan salah satu laut yang memainkan peran penting dalam perdagangan barang internasional (Minister of Transport, n. d.). Laut Vietnam terletak di garis dunia yang menghubungkan Asia Timur - Samudera Pasifik dengan Eropa, Afrika serta wilayah di Asia Timur seperti Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Taiwan dan Singapura. Negara-negara dan ekonomi wilayah tersebut bergantung pada rute laut internasional Vietnam melalui Laut Timur (Than Nien Newspaper, 2010).

Vietnam mempunyai lebih dari 100 pelabuhan dan dermaga. Tiga pelabuhan diantaranya yaitu Pelabuhan Hai Phong, Pelabuhan Da Nang dan Pelabuhan Ho Chi Minh. Tiga pelabuhan tersebut memainkan peran kunci di Vietnam karena menghubungkan Vietnam bagian utara, tengah dan selatan serta penghubung jalur laut regional dan internasional. Jumlah perpindahan barang melalui pelabuhan Vietnam setiap tahun meningkat rata-rata lebih dari 12% (Ministry of Transport Vietnam, 2010).

Komoditas ekspor utama Vietnam berupa barang yaitu minyak mentah, tekstil, pakaian, produk perikanan, produk pertanian, mebel kayu, peralatan elektronik dan barang plastik yang dipasarkan di Asia (50%), Eropa (25%), Australia dan Afrika (13%) serta Amerika (12%). Sedangkan impor utamanya adalah mesin, bensin dan minyak, besi dan baja, dan pupuk. Sedangkan untuk impor, negara-negara Asia mengandalkan 55%, Eropa 25% dan Amerika 14% dari Vietnam untuk dijadikan pasar. Beberapa contoh aktivitas di pelabuhan Vietnam yaitu kegiatan ekspor impor terutama negara-negara ASEAN serta Tiongkok dan Hongkong (PDP Australia Pty Ltd, 2015).

Partner perdagangan internasional terbesar Vietnam yaitu Tiongkok. Vietnam dan Tiongkok mulai menjalin normalisasi hubungan pada November 1991. Sejak itu, hubungan bilateral antar kedua negara di bidang perdagangan dan investasi tumbuh dengan cepat. Data yang diperoleh dari *General Statistics Office* Vietnam menunjukkan bahwa angka perdagangan dari kedua negara mengalami peningkatan sejak tahun 2011-2014. Komoditas utama ekspor Vietnam ke Tiongkok yaitu berupa minyak, batubara, produk pertanian dan perikanan. Selain itu Tiongkok mengandalkan impor beras dari Vietnam yang merupakan importir beras terbesar di Tiongkok (Xinhua, 2015).

Kemudian komoditas produk dari Tiongkok yang diimpor oleh Vietnam diantaranya yaitu buah, sayuran, pupuk, bahan kimia, komputer, mesin, baja dan bahan utama untuk industri garmen di Vietnam (Womack, 2009). Pada tahun 2015, Tiongkok menyatakan bahwa dirinya masih menjadi partner terbesar Vietnam dalam bidang perdagangan. Pernyataan tersebut sesuai dengan *General*

Statistics Office (GSO) Vietnam yang mencatat bahwa total perdagangan kedua negara sebesar \$ 49,3 milyar (China Daily, 2015).

Di bawah ini penulis memperlihatkan tabel lima negara importir terbesar Vietnam periode 2011-2015. Dalam tabel di bawah ini menggambarkan secara singkat hubungan dagang Vietnam dengan negara di sekitarnya dan menunjukkan bahwa Tiongkok adalah *top importir* Vietnam.

Tabel 1.1

Lima Negara Importir Terbesar Vietnam (Juta US \$)

Negara	2011	2012	2013	2014	2015
Tiongkok	24,866.4	29,035.0	36,886.5	43,710.6	49,498.7
Korea	13,175.9	15,535.4	20,677.9	21,763.2	27,631.1
Jepang	10,400.7	11,602.1	11,558.3	12,925.8	14,360.4
Taiwan	8,556.8	8,534.2	9,402.0	11,079.2	10,991.5
Thailand	6,383.6	5,791.9	6,283.4	7,092.8	8,279.3

Sumber: General Statistics Office of Vietnam

Data di atas menunjukkan bahwa impor terbesar Vietnam didatangkan dari Tiongkok. Hal tersebut berarti Vietnam merupakan pasar dari Tiongkok dalam komoditas tertentu. Dalam melakukan aktivitas perdagangan internasional, kedua negara memilih jalur laut karena salah satu pelabuhan di Vietnam memainkan peran penting dalam perdagangan internasional. Pelabuhan tersebut yaitu Hai Phong yang menjadi zona perdagangan antara Vietnam dan Tiongkok karena penghubung antara Vietnam dan Tiongkok (Martinez, 2007).

Jalur perairan di Laut Vietnam tersebut nyatanya tidak terlepas dari ancaman. Ancaman tersebut yaitu berupa *armed robbery* yang dilakukan terhadap awak kapal yang berlayar melalui perairan Vietnam. Selama Januari-Juni 2015, 13 insiden dilaporkan di pelabuhan dan jangkar di Vietnam. Delapan dari 13 insiden terjadi di Vung Tau pelabuhan (di bagian selatan Vietnam) dan lima dilaporkan di sekitar Hon Gai dan Hai Phong (bagian utara Vietnam) (ReCAAP, 2015)

Di bawah ini penulis menyajikan tabel lokasi *armed robbery* periode 2011-2015 dari *ICC IMB Piracy and Armed Robbery Against Ships 2015 Annual Report* yang menggambarkan beberapa negara di Asia yang menjadi lokasi *armed robbery*.

Tabel 1.2

Lokasi *Armed Robbery* di Asia

Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015
Indonesia	46	81	106	100	108
Selat Malaka	1	2	1	1	5
Malaysia	16	12	9	24	13
Myanmar	1	-	-	-	-
Filipina	5	3	3	6	11
Selat Singapura	11	6	9	8	0
Thailand	-	-	-	2	1
China	2	1	-	-	4
Laut China Selatan	13	2	4	1	-
Vietnam	8	4	9	7	27

Sumber: ICC International Maritime Bureau, 2015.

Data di atas menunjukkan bahwa *armed robbery* di Asia pada tahun 2011-2015 paling tinggi berada di Indonesia. Di perairan wilayah Asia Tenggara,

Indonesia merupakan lokasi perompakan dengan jumlah paling tinggi, disusul dengan Malaysia, Filipina, Selat Malaka dan Thailand. Sementara di perairan Asia bagian Timur, Vietnam menempati posisi tertinggi lokasi terjadinya perompakan yang kemudian diikuti di wilayah China dan Laut China Selatan. Perompak di Vietnam beraksi dengan menyerang kapal-kapal yang sedang berlayar di wilayah perairan internal Vietnam.

Salah satu negara yang menggunakan jalur laut Vietnam adalah Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar Vietnam. Tiongkok sendiri mempunyai kerjasama *Maritime Silk Route* yang bertujuan untuk memperkuat pengaruh ekonomi di regionalnya. Salah satu jalur sutra tersebut adalah jalur laut Vietnam (Nikkei, 2015). Dengan adanya ancaman *armed robbery*, mendorong Vietnam dan Tiongkok agar memperkuat kemandirian maritim. Oleh karena itu Vietnam dan Tiongkok telah menyepakati adanya kerja sama maritim untuk mengatasi *armed robbery*.

Kerja sama maritim Vietnam dan Tiongkok didasarkan pada *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* yang merupakan kesepakatan antara negara anggota ASEAN dan Tiongkok dalam mengambil langkah untuk memastikan perdamaian dan stabilitas keamanan maritim. Kegiatan kerja sama tersebut meliputi perlindungan lingkungan laut, penelitian ilmiah kelautan, kemandirian navigasi dan pemberantasan kejahatan transnasional seperti penyelundupan, terorisme dan *armed robbery* (ASEAN, 2004).

Dengan adanya kerja sama yang dilakukan oleh Vietnam dan Tiongkok diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan di sekitar perairan Vietnam, terutama ancaman dari *armed robbery*. Hal tersebut mengingat bahwa perdagangan bilateral kedua negara hampir 90% dilakukan melalui jalur laut sehingga Vietnam dan Tiongkok harus berupaya untuk mengamankan jalur perdagangan dari ancaman *armed robbery*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

“Bagaimana kerja sama Vietnam dan Tiongkok dalam menanggulangi *armed robbery* pada periode 2011-2015?”

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui isu *armed robbery* di perairan Vietnam.
2. Memberikan gambaran hubungan perdagangan Vietnam dan Tiongkok.
3. Mengetahui kerja sama Vietnam dan Tiongkok dalam menanggulangi *armed robbery* periode 2011-2015.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan akademik dalam bidang studi Hubungan

Internasional dengan konsentrasi kejahatan transnasional khususnya terkait kejahatan di bidang maritim.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan dalam pemecahan masalah berupa fakta terkait permasalahan *armed robbery* yang terjadi di perairan Vietnam yang masih terjadi dalam jangka waktu 2011-2015.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Liberalisme Interdependensi

Liberalis mempunyai pandangan positif terhadap dunia bahwa sifat manusia adalah baik dan berpikir rasionalis, jadi konflik bisa dicegah. Dalam liberalis, mempromosikan kerjas ama dianggap jalan terbaik untuk mencegah konflik agar mampu tercipta perdamaian dunia. Liberal memiliki keyakinan besar terhadap akal pikiran manusia dan yakin bahwa prinsip-prinsip rasional dapat dipakai pada masalah-masalah internasional. Kaum liberal mengakui bahwa sifat dasar individu selalu mementingkan diri sendiri dan saling bersaing terhadap suatu hal. Namun liberal juga percaya bahwa individu memiliki banyak kepentingan dan dengan demikian dapat terlibat dalam aksi sosial yang kolaboratif dan kooperatif, baik domestik maupun internasional yang menghasilkan manfaat besar bagi setiap orang baik di dalam maupun luar negeri (Sorensen, 2013, hal. 175).

Liberalisme percaya akan kemajuan. Kemajuan bagi kaum liberal merupakan kemajuan bagi individu. Kemajuan yang ingin dicapai liberal merupakan hasil dari proses modernisasi yang terjadi dalam berbagai bidang

di kehidupan. Proses modernisasi tersebut akan memperluas ruang lingkup bagi kerja sama lintas batas internasional. Kemajuan berarti kehidupan yang lebih baik bagi mayoritas individu. Manusia sebagai makhluk yang memiliki akal pikiran dan mempergunakannya untuk menyelesaikan masalah-masalah internasional dengan bekerja sama, maka akan mendapat hasil akhir yang lebih baik (Sorensen, 2013, hal. 176).

Pada dasarnya, kaum liberal berpendapat bahwa pembagian tenaga kerja yang tinggi dalam perekonomian internasional akan meningkatkan interdependensi antarnegara. Asumsi dasar liberalisme interdependensi adalah terfokus pada perdagangan internasional. Negara-negara industrialis cenderung lebih mementingkan kerjasama mengenai sumber-sumber yang mampu diolah secara bersama-sama dalam mencapai sebuah kesejahteraan. Liberalisme interdependensi beranggapan bahwa perekonomian internasional yang meningkatkan interdependensi antar-negara akan menekan dan mengurangi konflik antar-negara. Bagi negara industrialis pembangunan ekonomi dan perdagangan luar negeri adalah alat-alat dalam mencapai keunggulan dan kesejahteraan (Sorensen, 2013, hal. 184).

Negara-negara yang saling terikat interdependensi dipaksa untuk selalu bekerjasama secara ekstensif dengan mengesampingkan hambatan yang terjadi. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat kerjasama dan integrasi, maka semakin sulit negara-negara untuk menarik diri dari komitmen-komitmen yang telah mereka buat karena rakyat dan pemerintah akan menyadari keuntungan yang diperoleh dengan adanya kerjasama (Rahmawati, 2012).

Berdasarkan asumsi liberal interdependensi, maka dapat dianalisa bahwa Vietnam dan Tiongkok telah terjadi hubungan yang saling membutuhkan. Hal tersebut sesuai dengan data yang diperoleh bahwa hingga tahun 2015 Tiongkok merupakan partner dagang terbesar Vietnam. Sebaliknya dengan Tiongkok, Vietnam merupakan negara yang dijadikan pasar dari hasil produksinya. Tiongkok sendiri merupakan negara yang membutuhkan bahan mentah dan bahan dasar makanan yang diperoleh dari Vietnam seperti batu bara, beras dan hasil perikanan.

1.5.2 Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional merupakan salah satu konsep dari studi hubungan internasional. Kerja sama dapat tercipta karena penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan yang di ambil oleh aktor-aktor lainnya. Dalam hal ini kerja sama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata. Kerja sama dapat tumbuh dari komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha pemenuhan kepentingan pribadi. Kunci dari perilaku kerja sama terdapat pada sejauh mana setiap aktor mempercayai bahwa yang lainnya akan bersedia melakukan kerja sama. Sehingga kunci utama dari kerja sama didasarkan pada kepentingan yang akan dicapai. Hal tersebut berarti kerja sama akan menguntungkan kedua belah pihak karena dengan bekerja sama akan lebih baik daripada dengan usaha sendiri atau dengan persaingan (Pfaltzgraff, 1997).

Dalam hal ini kerja sama internasional muncul karena perbedaan kondisi dan kebutuhan masing-masing negara. Hal tersebut ditambah dengan perbedaan kemampuan dan potensi masing-masing negara. Hal ini kemudian menjadikan negara membutuhkan kemampuan dan kebutuhan yang dapat diperoleh dengan negara lain. Kerja sama internasional akan menjadi suatu komponen yang penting sehingga patut untuk dipelihara dan diadakan aturan agar berjalan dengan tertib sehingga tumbuh adanya keuntungan dan perdamaian antar negara (Zulfikli, 2012).

Menurut K.J. Holsti (1988) dalam buku Politik Internasional Kerangka untuk Analisis, telah dijelaskan alasan-alasan negara melakukan kerja sama dengan negara lain yang di antaranya adalah:

- a) Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dengan kerja sama diharapkan dapat mengurangi beban biaya yang harus ditanggung dalam kegiatan produksi dan meminimalisasi keterbatasan yang dimiliki negara tersebut;
- b) Kerja sama diharapkan mampu menciptakan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya;
- c) Kerja sama internasional diharapkan mampu mengatasi masalah atau konflik yang mengancam keamanan bersama;
- d) Kerja sama mampu mengurangi dampak negatif seperti kerugian yang disebabkan oleh perilaku warga negara yang dapat merugikan negara lain (Holsti, 1997).

1.5.3 Teori Keunggulan Komparatif

Teori perdagangan internasional dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yakni teori klasik dan teori modern. Salah satu teori klasik yang umum dikenal adalah teori keunggulan komparatif dari J.S Mill dan David Ricardo yang merupakan kritikan terhadap teori keunggulan absolut dari Adam Smith. Asumsi dari teori keunggulan komparatif adalah bahwa jika suatu individu atau negara relatif lebih efisien dalam memproduksi barang lebih baik dari individu atau negara lain maka dapat dikatakan bahwa individu atau negara tersebut memiliki keunggulan komparatif (Kilic, 2012).

J.S Mill beranggapan bahwa suatu negara akan mengkhususkan diri pada ekspor barang tertentu bila negara tersebut memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) terbesar dan akan mengkhususkan diri pada impor barang apabila negara tersebut memiliki kerugian komparatif (*comparative disadvantage*) atau suatu negara akan melakukan ekspor barang apabila barang tersebut dapat diproduksi dengan biaya rendah dan akan melakukan impor barang apabila barang tersebut jika diproduksi sendiri akan memerlukan biaya produksi yang lebih besar (Tambunan, 2000, hal. 25)

Sedangkan pemikiran David Ricardo dalam teori keunggulan komparatif adalah perdagangan antara dua negara akan terjadi apabila masing-masing negara memiliki biaya relatif terkecil untuk jenis barang yang berbeda. Jadi, penekanan David Ricardo pada perbedaan efisiensi relatif antarnegara dalam memproduksi dua atau lebih jenis barang yang menjadi dasar terjadinya perdagangan internasional (Tambunan, 2000, hal. 25).

Keunggulan komparatif akan tercapai apabila jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Keunggulan komparatif merupakan suatu keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara untuk dapat dibandingkan dengan negara lain. Keunggulan komparatif disebabkan oleh adanya perbedaan dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, modal, tenaga kerja dan kemampuan dalam penguasaan teknologi (Perizade, n.d.).

Asumsi teori keunggulan komparatif sesuai dengan perdagangan internasional yang dilakukan antara Tiongkok dan Vietnam. Kedua negara tersebut saling mendapatkan keuntungan dalam melakukan perdagangan internasional karena mempunyai komoditas utama yang dapat diekspor ke negara lain, sedangkan kebutuhan nasional yang tidak mampu diproduksi sendiri oleh negaranya sendiri dapat didatangkan dari negara lain. Dalam hal ini Vietnam mempunyai komoditas utama tersendiri yang dipasarkan ke Tiongkok seperti beras, minyak, batu bara dan produk perikanan. Kemudian Tiongkok mempunyai komoditas utama tersendiri yang dipasarkan ke Vietnam seperti bahan kimia, pupuk, mesin, baja dan bahan dasar industri garmen.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif sebagai dasar dalam pengumpulan data. Data kualitatif merujuk merujuk pada data kualitas objek penelitian, yaitu ukuran data berupa non angka, tetapi

merupakan satuan kualitas (misalnya tinggi, rendah, baik, buruk) atau serangkaian informasi verbal dan non verbal yang disampaikan informan kepada peneliti untuk menjelaskan perilaku ataupun peristiwa yang menjadi fokus penelitian (Idrus, 2009, hal. 22). Alasan penulis memilih metode ini karena topik yang dibahas dalam penelitian ini merupakan suatu realitas dan fenomena sosial yang bersifat dinamik yaitu mengenai perompakan di Vietnam. Selain itu, karena data-data yang dibutuhkan penulis merupakan data-data yang tersedia di lapangan baik berupa wawancara dengan informan, studi kepustakaan, dokumen-dokumen, artikel, jurnal atau penulisan ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 *Armed Robbery*

International Maritime Organization (IMO) sebagai salah satu organisasi dibawah Perserikatan Bangsa-Banngsa (PBB) mendefinisikan *armed robbery* sebagai:

- a. Tindakan kekerasan atau penahanan ilegal atau tindakan pengusuran, atau ancaman daripadanya, selain tindakan pembajakan yang dilakukan untuk tujuan pribadi dan ditujukan terhadap kapal atau terhadap orang atau harta benda di atas kapal tersebut di dalam Negara perairan dalam, perairan kepulauan dan laut teritorial;
- b. Tindakan menghasut atau sengaja memfasilitasi tindakan yang dijelaskan di atas (International Maritime Organization, 2017).

1.6.1.2 Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional (*International Trade*) atau disebut dengan perdagangan antarbangsa-bangsa, pertama kali dikenal di benua Eropa yang kemudian berkembang di Asia dan Afrika. Menurut Sumantoro, pengertian perdagangan internasional adalah: *the exchange of goods and services between nations* dan selanjutnya “*as used, it generally refer to total goods and services exchanges among all times*”, yang intinya mengandung pengertian pertukaran barang dan jasa antara semua negara/bangsa. Secara umum, pengertian perdagangan internasional adalah kegiatan-kegiatan perniagaan dari suatu negara asal yang melintasi perbatasan menuju suatu negara tujuan yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan perpindahan barang dan jasa, modal tenaga kerja, teknologi (pabrik) dan merek dagang. Perdagangan internasional mempunyai dua kegiatan pokok yaitu ekspor dan impor yang hanya dapat dilakukan dalam batas-batas tertentu sesuai dengan kebijakan pemerintah (Sood, 2012, hal. 17-18).

1.6.1.3 Interdependensi

Interdependensi dalam politik global menyiratkan bahwa aktor yang saling terkait atau terhubung sehingga terjadi suatu hubungan pada setidaknya satu aktor, satu kesempatan, satu tempat dan akan mempengaruhi semua pelaku. Jadi setiap sistem hubungan yang terdiri lebih dari satu aktor akan menimbulkan tingginya ketergantungan. Menurut Keohanne & Nye, interdependensi merupakan hubungan yang saling ketergantungan dan selalu menyiratkan sensitivitas dalam jangka waktu tertentu. Semua aktor dalam suatu sistem internasional yang

bekerjasama akan menentukan apakah saling ketergantungan yang simetris atau tidak. (Newham, 1998, hal. 256).

Konsep interdependensi berarti seperangkat keterhubungan yang relatif sejajar antara negara-negara anggota dan menjadikan fakta awal bahwa negara yang saling bekerjasama dalam sistem internasional saling terhubung sebagai pijakan awalnya. Misalnya seperti penetapan tarif, perjanjian damai atau bantuan luar negeri yang berpotensi untuk menciptakan kesempatan sekaligus menciptakan tantangan bagi negara-negara yang saling bekerjasama dalam sistem internasional (Rahmawati, 2012, hal. 87).

1.6.1.4 Kerja Sama

Kerja sama internasional merupakan konsep yang telah digunakan dalam literatur hubungan internasional. Kerja sama internasional merupakan sebuah hubungan suatu negara dengan negara lain dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan nasional. Bentuk kerja sama internasional dapat berupa kerja sama di bidang ekonomi, politik, lingkungan hidup dan keamanan (Paulo, 2014).

Menurut K. J. Holsti, alasan negara melakukan kerja sama internasional diantaranya adalah:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dengan adanya kerja sama dengan negara lain diharapkan dapat mengurangi biaya produksi dan memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh negara tersebut;

- b. Meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya;
- c. Mengatasi masalah atau konflik yang dialami oleh negara.
- d. Mengurangi kerugian negara akibat tindakan negatif oleh warga negara tersebut (Holsti, 1997).

1.6.2 Operasionalisasi Konsep

1.6.2.1 *Armed Robbery*

Armed robbery yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aktivitas *armed robbery* yang terjadi perairan Vietnam. Aktivitas *armed robbery* tersebut berupa adanya tindak pencurian yang terjadi di beberapa kapal yang melintasi jalur laut Vietnam. Dalam hal ini perompak melakukan pencurian terhadap barang yang dibawa oleh kapal seperti bahan makanan dan bahan bakar.

1.6.2.2 Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai aktivitas ekspor dan impor yang dilakukan oleh Tiongkok dan Vietnam. Perdagangan tersebut yaitu berupa komoditas barang utama masing-masing negara. Perdagangan barang dilakukan antar kedua negara karena saling mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut yaitu apabila negara mempunyai komoditas utama yang dapat diekspor ke negara lain, maka hal tersebut akan meningkatkan pendapatan negara. Selain itu perdagangan barang dilakukan karena kurangnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan nasional sehingga negara harus mendatangkan barang dari negara lain.

Dalam melakukan perdagangan internasional Vietnam dan Tiongkok mempunyai komoditas utama yang akan dipasarkan. Komoditas utama ekspor Vietnam yaitu berupa minyak, batubara, beras dan produk perikanan. Sedangkan komoditas utama Tiongkok yaitu buah, sayuran, pupuk, bahan kimia, komputer, mesin, baju, dan bahan utama garmen untuk industri garmen di Vietnam.

1.6.2.3 Interdependensi

Interdependensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketergantungan ekonomi antara Vietnam dengan Tiongkok dalam hal pemenuhan kebutuhan nasional masing-masing negara. Salah satu contoh dari interdependensi ini adalah Tiongkok yang masih mengandalkan impor beras dari Vietnam. Selain itu Vietnam menjadikan Tiongkok sebagai partner dalam hal memajukan industri Vietnam, seperti mengandalkan bahan baku untuk industri garmen di Vietnam.

1.6.2.4 Kerja sama Internasional

Kerja sama internasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh Vietnam dan Tiongkok dalam mengatasi permasalahan *armed robbery*. Upaya menjaga keamanan tersebut didasarkan pada *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* yang pada implementasinya berbentuk patroli bersama yang dilakukan oleh Vietnam dan Tiongkok di sekitar perairan Vietnam.

1.6.3 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau analisa mengenai suatu hasil penelitian tanpa membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, satu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat hubungan antarfenomena yang diteliti (Nazir, 2013, hal. 54). Dalam hal ini peneliti bermaksud untuk memberi gambaran tentang upaya yang dilakukan oleh Vietnam dan Tiongkok dalam mengatasi *armed robbery* di perairan Vietnam. Hal tersebut mengingat bahwa Tiongkok merupakan mitra dagang utama Vietnam dan dalam melakukan perdagangan kedua negara telah memilih jalur laut.

1.6.4 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada *armed robbery* di perairan Vietnam terhadap hubungan dagang Vietnam-Tiongkok tahun 2011-2015 karena data yang diperoleh menyatakan bahwa *armed robbery* di perairan Vietnam mulai mengalami peningkatan dari tahun 2011-2015.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Informasi yang diperoleh peneliti adalah informasi yang berkaitan dengan *armed robbery* di Vietnam terhadap hubungan perdagangan barang antara

Vietnam-Tiongkok periode 2011-2015. Pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data-data sekunder dari berbagai bahan seperti artikel-artikel dalam surat kabar, buku, artikel-artikel dari jurnal ilmiah, laporan-laporan, arsip organisasi serta catatan-catatan perpustakaan. Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian di berbagai perpustakaan, seperti Perpustakaan Widya Puraya dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

b. Studi Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen dalam bentuk catatan, seperti buku harian, surat pribadi, autobiografi. Selain itu studi dokumentasi memperoleh data melalui dokumen resmi yang terbagi menjadi dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan, keputusan pemimpin kantor dan sebagainya. Sedangkan dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya buletin, majalah, pernyataan dan berita yang tersiar kepada media massa. Studi dokumentasi memanfaatkan media massa internet untuk mendapatkan data dari artikel-artikel berita penting terkait, jurnal-jurnal ilmiah dan hasil

penelitian beberapa tokoh yang ahli di bidang terkait (Moloeng, 2010, hal. 160-163).

1.6.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan metode statistik. Teknik data kualitatif menggunakan informasi melalui data-data yang dikumpulkan atau pengalaman langsung terhadap fenomena sosial yang diteliti dan nantinya akan menggiring pada pola atau teori yang akan menjelaskan fenomena sosial yang terjadi (Soemantri, 2005, hal. 57).

Kegiatan dalam analisis data kualitatif menurut Miles, M.B. dan Huberman, A.M., yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi data

Data yang diperoleh peneliti dalam jumlah banyak perlu dicatat secara rinci. Kemudian data-data tersebut diolah dengan cara mereduksi. Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dan membuang hal-hal yang tidak diperlukan. Tujuan reduksi data adalah memberikan gambaran yang jelas untuk mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data

Setelah melakukan reduksi data, proses selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah penyajian dalam bentuk teks naratif. Selain bentuk teks naratif, data dapat disajikan dengan bentuk tabel, grafik maupun matriks.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Setelah penyajian data, maka langkah berikutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan proses menyimpulkan isi dari tulisan dimana hal tersebut masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dalam mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah berupa temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan tersebut dapat berupa disukusi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar-samar sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan terbagi dalam empat bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- a. Bab I berisi bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran dan metodologi penelitian yang terdiri dari operasionalisasi konsep, tipe

dan jangkauan penelitian, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

- b. Bab II menjelaskan mengenai perkembangan kejahatan *armed robbery* yang terjadi di Perairan Vietnam serta hubungan perdagangan komoditas barang Vietnam-Tiongkok.
- c. Bab III menjelaskan mengenai upaya kerja sama kedua negara dalam mengatasi *armed robbery* yang dianalisa menggunakan teori-teori dan data yang ditemukan.
- d. Bab IV merupakan kesimpulan atas serangkaian isi dari penelitian yang dilakukan. Selain itu, bab ini berisi saran penulis terkait topik penulisan penelitian ini.